

SEJARAH BENTENG VREDEBURG DIUNGKAP

Belanda Pernah Lecehkan Pangeran Diponegoro

YOGYA (KR) - Benteng Rustenburg yang sekarang dikenal sebagai Benteng Vredeburg Yogyakarta, dibangun pada 1760 oleh Residen Cohen Donkel atas izin Sri Sultan HB I. Proyek pembangunan berlangsung kurang lebih 25 tahun dan selesai pada 1785.



Benteng Vredeburg dari depan.

Menurut Direktur Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Agus Santoso pembangunan Benteng Rustenburg bertujuan sebagai benteng pertahanan pada saat diresmikan, ditempatkan 100 orang pasukan VOC yang dipimpin seorang kapten. Tugas mereka melindungi kompleks Kraton dari musuh. Tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan VOC di Yogyakarta," paparnya pada seminar dari Menggali

Kisah di Balik Kemegahan Benteng Vredeburg Yogyakarta, belum lama ini.

Setelah berakhirnya masa kolonial Belanda, Benteng Vredeburg diambil alih oleh tentara Nasional Indonesia pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Sebelumnya pada masa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, benteng dijadikan markas militer Republik Indonesia. Benteng juga digunakan sebagai tempat

penahanan bagi tawanan orang Belanda maupun Indo Belanda yang ditangkap.

Sementara itu, Sejarawan Peter Carey mengatakan ada dua peristiwa bersejarah dan mencekam di Benteng Vredeburg, yakni serangan Inggris ke Kraton Yogyakarta pada 20 Juni 1812 dan penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro di muka umum pada 21 Mei 1825.

Carey mengatakan pasukan

Inggris di bawah komando Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles menyerbu Kraton Yogyakarta pada pagi buta, membawa pasukan 1.200 orang dan berkumpul di dalam benteng sebelum hari penyerbuan. Pasukan berkumpul di Benteng secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan Sri Sultan HB II.

Benteng Vredeburg juga menjadi saksi atas penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro oleh pejabat Belanda yang datang ke Yogya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai salah satu pemicu awal mula pecahnya perang Jawa. Kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Mei 1825.

Residen Anthonie Hendrik Smisssert yang menjabat sebagai residen sebelum perang Jawa itu bersekongkol dengan Patih Danurejo IV meremehkan Pangeran Diponegoro.

(M-1)f

Cari Ikan di Pintu Air, Hanyut

MAGELANG (KR) - Salah satu warga Kampung Dumpho Kelurahan Potrobangsang Kota Magelang saat mencari ikan di pintu air aliran Kali Bening yang ada di wilayah RT 10/RW 7 Dumpho Potrobangsang, Minggu (14/2), hanyut. Hingga semalam proses pencarian masih berlangsung hingga kawasan aliran Kali Progo yang ada di wilayah Kabupaten Magelang.



KR-M Thoha

Relawan dan warga berada di sekitar lokasi hanyutnya pencari ikan di pintu air aliran Kali Bening, Potrobangsang, Magelang.

Informasi yang diperoleh di lokasi kejadian menyebutkan, Minggu sore ada tiga warga Kampung Dumpho yang mencari ikan di pintu air Kali Bening menggunakan jaring. Kapolsek Magelang Utara Kompol Kholid Mawardi SH MH saat ditemui wartawan di lokasi kejadian, membenarkan kabar hanyutnya warga Dumpho tersebut.

Namun saat korban hendak menyerok ikan, mendadak

salah satu warga bernama M Bintang S (18) terjerebab dan masuk ke aliran Swareng, yang merupakan cabang aliran Kali Bening dari pintu air tersebut yang menuju ke aliran Kali Progo.

Mengetahui hal itu, dua warga lainnya memberitahu warga

lainnya. Proses pencarian langsung dilakukan, baik oleh tim Polsek Magelang Utara yang dipimpin Kapolsek Magelang Utara, Tim SAR dan relawan lainnya. Pencarian tidak hanya dilakukan di sekitar lokasi, tetapi juga hingga ke aliran Kali Progo.

(Tha)-f

Menolak

Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 13B, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanganan penyebaran Covid-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-undang yang dimaksud adalah

UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam Pasal 14 UU tersebut menyatakan: (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta;

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Pasal 15 (1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100 juta;

(2) Barang siapa karena kealpaannya

mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10 juta;

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Perpres No. 14/2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Sabtu (13/2), jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 1.060.326 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua mencapai 415.486 orang. (Ant)-f

Sambungan hal 1

Menhub:

Terlebih ini adalah produk inovasi anak bangsa. "Penerapan GeNose sudah sepatutnya kita dukung," ujarnya.

Didik Hartantyo, Dirut PT KAI (Persero) mengungkapkan semenjak diterapkan di dua stasiun awal, yakni Tugu dan Pasar Senen,

GeNose mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Oleh karenanya, pihak PT KAI akan menambah layanan GeNose di berbagai stasiun. "Kami kini tengah meningkatkan sistem integrasi antara PT KAI dan UGM terkait GeNose ini," terangnya. (Dev)-f

Sambungan hal 1

Pengendali

tipe urugan random dan Zonal Inti Tegak, dengan panjang bendungan 233 meter, lebar puncak bendungan 10 meter dan tinggi bendungan 74 meter. Bendungan tersebut juga dapat menjadi penggerak PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 132 KW. Selain itu dapat mereduksi banjir hingga 44,86 m3/detik.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah

Indar Parawansa, Bendungan Tukul diproyeksikan untuk mendorong produksi padi Jawa Timur yang diklaim sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia yaitu berkontribusi terhadap 18,17 persen gabah kering giling sebesar 10,02 juta ton atau setara 5,76 juta ton beras.

Khofifah juga mengatakan, Provinsi Jawa Timur menjadi produsen jagung ter-

tinggi yaitu 6,6 juta ton atau 21,8 persen produksi jagung nasional.

Turut serta dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan pejabat terkait lainnya. (Ant)-f

Sambungan hal 1

Radikal

juga alumni ITB pernah mengatakan, bahwa persatuan adalah kata kunci meraih kemajuan bangsa. Kalau sesama anak bangsa saling hujat, akan membuat persatuan rapuh. Akhinya terpuruk pada kehancuran.

Persoalan utama yang terjadi saat ini adalah munculnya potensi lemahnya persatuan dengan maraknya tindakan saling hujat, ujaran kebencian dan fitnah sesama anak bangsa. Sejarah mencatat, para tokoh bangsa ini, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir, Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh yang lain, sangat prihatin dengan lemahnya persatuan sesama anak bangsa. Terpuruknya bangsa ini dijajah ratusan tahun adalah karena faktor lemahnya persatuan. Soekarno dan tokoh-tokoh yang lain dalam perjuangan meraih kemerdekaan selalu menekankan betapa pentingnya persatuan. Jangan sampai sesama anak bangsa saling hujat, saling fitnah karena kepentingan politik jangka pendek.

Ketika ada tokoh masyarakat atau warga negara

biasa melakukan kritik kepada pemerintah, jangan dianggap radikal. Karena sesungguhnya demokrasi akan semakin sehat dan kuat manakala ada kritik. Komponen civil society harus mampu melakukan fungsi kontrol sosial melalui berbagai kritik yang membangun dan menyehatkan. Justru kritik adalah bagaikan obat yang akan menyehatkan demokrasi. Sebaliknya tindakan yang hanya memuji penguasa terkadang bagaikan racun menyehatkan, bahkan membunuh demokrasi. Sangat berbahaya kalau kritik kepada pemerintah dianggap tindakan radikal.

Ke depan kita perlu menjaga etika berkomunikasi dan bertindak dalam merawat demokrasi dan persatuan di negeri tercinta ini. Etika berkomunikasi sesungguhnya sangat penting dipraktikkan dalam membangun budaya bangsa. Bagaimana strategi seorang komunikator agar ia disukai atau dibenci oleh masyarakat, bagaimana mengemas sebuah pesan agar bisa diterima atau ditolak masyarakat, hingga bagaimana memahami kondisi audiens (masya-

rakat) agar bertepuk tangan atau marah pada pesan yang disampaikan. Prof Dan Nimmo dalam buku 'Teori Komunikasi Politik' menjelaskan bahwa pilihan-pilihan kata dalam mengemas sebuah pesan bisa berdampak positif atau negatif bagi masyarakat.

Kini, faktor perbedaan pilihan politik telah membuat masyarakat terbelah dan melakukan tindakan menghalak segala cara. Padahal masyarakat sudah lelah dan bosan dengan ujaran kebencian yang diproduksi para petualang politik. Saatnya ujaran kebencian mengubur emosi dan berbagai kecurigaan, diakhiri. Semua itu sangat tidak produktif dan justru menguras tenaga dan pikiran. Yang diperlukan adalah kemampuan persatuan dan kedamaian sesama anak bangsa. Membiarkan ujaran kebencian sama halnya dengan memelihara permusuhan yang menjadi prahara berbahaya bagi bangsa dan negara. (Penulis adalah Ketua Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)-f

Sambungan hal 1

KBRI

perkembangan dari peristiwa ini, serta menyediakan layanan telepon di +81 80 3506 8612 dan +81 80 4940 7419.

Gempa berkekuatan 7,3 SR yang menghantam lepas pantai Jepang timur pada Sabtu (13/2) melukai puluhan orang dan menyebabkan padam listrik tanpa adanya kerusakan berarti dan peringatan tsunami. Seperti dilaporkan Badan Meteorologi

Jepang, gempa di lepas pantai prefektur Fukushima ini, mencapai kedalaman hingga 60 km, Gempa menggoyang bangunan selama beberapa saat, tak lama setelah pukul 11:00 malam waktu setempat.

Rumah dan perkantoran di ibukota Tokyo, yang berjarak ratusan kilometer dari pusat gempa, ikut bergetar. Tidak

ada peringatan tsunami yang dikeluarkan. Menurut laporan Kantor Berita Kyodo, tidak ada gangguan di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi dan Daini atau di PLTN Kahiwazaki-Kariwa. Disebutkan pula, tidak ada perubahan tingkat radiasi di sekitar PLTU tersebut. (Ant)-f

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Cuaca	Suhu	Kelembaban
Bantul			23-30	70-95
Sleman			23-31	75-95
Wates			23-31	70-95
Wonosari			23-31	70-95
Yogyakarta			23-30	70-95



Rezki Satris SIP MA
Dosen Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

Membangun Budaya Politik di Masyarakat

menjadi 6.48 dengan peringkat ke-64 Dunia. Adapun peringkat pertama dari indeks demokrasi global adalah Norwegia dengan skor tertinggi 9,81. Pertanyaannya kemudian adalah, indikator apa yang menyebabkan Indonesia mengalami penurunan terhadap indeks demokrasi global? Ada sejumlah indikator yang diukur pada aspek ini diantaranya keyakinan terhadap demokrasi, kepemimpinan pada cabang kekuasaan, budaya politik masyarakat dan lainnya.

Terkait budaya politik masyarakat, dari data yang dirilis oleh EIU bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap turunnya indeks demokrasi Indonesia adalah budaya politik dengan perolehan skor 4,38 poin dari 5,63 di tahun 2019. Lantas apa definisi dari budaya politik tersebut? Mengutip definisi budaya politik dari Gabriel A. Almond dan Sidney Verba bahwa

budaya politik merupakan sebuah orientasi sikap politik masyarakat terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya serta peranan masyarakat terhadap sistem tersebut.

Dalam konteks sejarah, konsep budaya politik ini muncul di akhir Perang Dunia Kedua sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian ilmuwan sosial politik yang menamakan diri sebagai kaum Behavioralism. Kaum Behavioralism itu sendiri merupakan turunan dari Positivisme yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial termasuk ilmu politik, seperti halnya ilmu-ilmu alam mampu memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam. Budaya politik suatu bangsa menjadi cerminan terhadap distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik yang ingin dicapai. Di mana dalam budaya politik terdapat

tiga orientasi politik yang telah dirumuskan oleh Parsons dan Shils, pertama, orientasi kognitif di mana pengetahuan masyarakat tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.

Kedua, orientasi afektif berfokus tentang perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. Terakhir, orientasi evaluatif yang menyangkut tentang keputusan dan pendapat objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Budaya politik suatu masyarakat akan berkembang dengan sendirinya sesuai kondisi dan kompleksitas yang ada dalam masyarakat tersebut. Ini bisa terjadi disebabkan karena masyarakat dipenuhi dengan interaksi antar

orientasi nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat. Miriam Budiarjo sendiri melihat bahwa satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik sebagai cerminan masyarakat terhadap pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, kegiatan dalam membangun budaya politik menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh semua kalangan masyarakat terutama pemangku kebijakan. Sehingga aspek psikologis dalam sistem politik yang menjadi hal utama dalam budaya politik bisa untuk diilankan. Bagaimana masyarakat bersikap terhadap sistem politik, sistem



kepercayaan, serta harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Membangun dan merubah pola pikir masyarakat tentang politik yang bersifat positif menjadi sangat penting. Selain itu, dorongan kesadaran masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam proses politik akan menghasilkan pilihan yang baik sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Menghadirkan bentuk kesadaran politik sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan serta pembangunan perlu untuk disosialisasikan. Sehingga, jika masyarakat memiliki kesadaran politik maka ia akan menyadari bahwa tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tanggung jawab bersama.***